

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Bayu, 1990: Mengenal Ilmu Pemerintahan
- Burhan Ashshofa, 2010, Metode Penelitian Hukum , Rineka Cipta, Jakarta.
- Bambang T. Soemantri, "Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa", Fokus Media, Bandung, 2011.
- Eko Sutoro, "Pemberdayaan Masyarakat Desa", Badan Diklat Provinsi Kaltim, Samarinda, 2002.
- HAW. Widjaja, "Otonomi Desa", PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Hanif Nurcholis, "Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa", Erlangga, Jakarta, 2011.
- Inu Kencana, 2001: 20 Ilmu Pemerintahan
- I. Gde Pantja Astawa, 2008, Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia, Alumni, Bandung.
- Ibrahim (1:2011) Penggunaan Wewenang Menurut Hukum
- Irawan Soejito, "Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah", Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- J. Kaloh, "Mencari Bentuk Otonomi Daerah", PT Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- J. Nasikun, "Mencari Suatu Strategi Pembangunan Masyarakat Desa Berparadigma Ganda", Andi Offset, Yogyakarta, 1995.
- Jimly Asshiddiqie, 2005, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia Konstitusi Press, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2006, Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Misdianti dan Kartasapoetra, 1993:17 *Pelaksanaan Otonomi Daerah*

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2005

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, "Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia", PSHTN FH UI dan Sinar Bakti, Jakarta, 1988.

M. Tahir Azhary, "Negara Hukum", Jakarta, Bulan bintang, 1992.

Marzuki, Peter Mahmud, 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.

Miriam Budiardjo, "Dasar-dasar Ilmu Politik", Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998.

Nurcholis Majid, 2012:68, *Pertumbuhan dan perkembangan demokrasi desa di Indonesia*

Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", Kencana, Jakarta, 2006.

Prajudi Atmosudirdjo, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Philipus M. Hadjon, 2005, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Sutarto (2001:141) *Dasar-dasar Organisasi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

SF, Marbun 2011, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta

S.F. Marbun, "Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 9 Vol 4 – 1997.

S. Prajudi Atmosudirjo, "Hukum Administrasi Negara", Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.

Siswanto Sunarno, "Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia", Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Sjachran Basah, "Ilmu Negara", PT Citra Aditiya Bakti, Bandung, 1997.

Sunyoto Usman, "Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat", Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.

Soerjono Soekanto dan Sri Mawudji, "Penelitian Hukum Normatif: Suatu tinjauan singkat", Rajawali Pers, Jakarta, 1995.

Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum", UI-Press, Jakarta, 2014.

Syaukani H.R, "Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan", PT Pustaka Pelajar, Jakarta, 2002.

Robert Chambers, "Pembangunan Desa Mulai Dari Belakang", LP3ES, Jakarta, 1987.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

### **Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

### **Peraturan – Peraturan**

- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
- Permendagri No 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

### **C. MAKALAH/ARTIKEL**

- BPHN, 2004, “Kedudukan Undang-Undang Pemerintahan Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Pasca Amandemen UUD 1945”, Makalah disampaikan pada Seminar Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman dan HAM RI bekerjasama dengan FH UNAIR, dan Kanwil Departemen Kehakiman dan HAM Provinsi Jawa Timur Surabaya tanggal 9-10 Juni 2004, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

Hoessien, Bhenyamin, 1995, “Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia : Akan Berputarlah Roda Desentralisasi dari Efisiensi ke Demokrasi”, Pidato dalam Pengukuhan Guru Besar Bidang Ilmu Administrasi Negara di Jakarta, 18 November 1995, Universitas Indonesia, Jakarta.

Bagir Manan, 1994, “Pelaksanaan Demokrasi Pancasila dalam Pembangunan Jangka Panjang II” (makalah dalam Lokakarya Pancasila) Universitas Padjadjaran, Bandung.

Eko Prasajo, 2008 “Konstruksi Ulang Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia: Antara Sentripetalisme dan Sentrifugalisme”, Pidato dalam Pengukuhan Guru Besar Bidang Ilmu Administrasi Publik di Jakarta 8 April 2008, Universitas Indonesia, Jakarta.

#### **D. INTERNET**

Pengertian Hukum Menurut Para Ahli Terlengkap

Sumber <http://www.spengetahuan.com/2015/02/20-pengertian-hukum-menurut-para-ahli-terlengkap.html>

Pengertian Pemerintahan

Sumber : <http://irwansahaja.blogspot.co.id/2015/02/pengertian-pemerintahan.html>

Pengertian pemerintahan Desa

Sumber <http://aguzsudrazat.blogspot.co.id/2014/03/pengertian-pemerintahan-desa.html>

Pengertian Tugas, Wewenang dan tanggungjawab

Sumber <http://annisayulia.blogspot.co.id/2012/11/tugas-wewenang-dan-tanggung-jawab.html>

Pengertian Kewenangan, by Damang S.H., M.H. · November 16, 2011

<http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-kewenangan.html>

Pengertian Kewenangan

Sumber : [http://www.kompasiana.com/rizkykarokaro/analisis-yuridis-terhadap-produk-hukum-yang-dibuat-berdasarkan-kewenangan-yang-bersifat-non-atributif\\_55485e8c547b61d20b25254e](http://www.kompasiana.com/rizkykarokaro/analisis-yuridis-terhadap-produk-hukum-yang-dibuat-berdasarkan-kewenangan-yang-bersifat-non-atributif_55485e8c547b61d20b25254e)

Pengertian Produk Hukum Daerah, Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng  
Sumber : <https://hukumsetda.bulelengkab.go.id/artikel/pengertian-produk-hukum-daerah-22>

Peraturan Desa  
sumber <http://educationoflaw12.blogspot.co.id/2016/02/peraturan-desa.html>

Pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014, oleh : Dr. H. Rachmat Maulana, S.Sos.MSi  
<http://rachmatdwimulya.blogspot.co.id/2014/09/pembaharuan-penyelenggaraan.html>

Tatakelola Desa dalam undang-undang Desa,  
<http://desamembangun.or.id/2014/04/tata-kelola-desa-dalam-uu-desa/>

Opini : Peluang dan Ancaman Otonomi Desa Pasca UU Nomor 6 Tahun 2014, oleh. Laudy Suwidarno, SE, M.Ak.  
<http://uptlpkd.bpkad.jatimprov.go.id/peluang-dan-ancaman-otonomi-desa-pasca-uu-nomor-6-tahun-2014/>

Peluang dan Ancaman Otonomi Desa Pasca UU Nomor 6 Tahun 2014  
Lab Kelola Artha (LKA) Edisi III, November 2015 23

Sekolah Pembaharuan Desa, Hak-hak Masyarakat dalam Tatakelola Pemerintahan Desa  
<https://sekolahdesa.or.id/hak-hak-masyarakat-dalam-tata-kelola-pemerintahan-desa/>